

## BEBERAPA ASPEK EKONOMI DALAM PENYUSUNAN PLANNING PENDIDIKAN

F. Hendrarto POESPOSOETJITO

### Pendahuluan

Dalam prasarana ini ingin diajukan beberapa pokok persoalan dalam bidang ekonomi pendidikan. Tidak dimaksudkan di sini untuk secara mendalam mengupas persoalan tersebut, melainkan sekedar memberikan bahan tambahan untuk diskusi.

Maksud untuk menyodorkan tema ini adalah tidak lain untuk memberikan bantuan pemikiran dalam penyusunan suatu planning pendidikan dalam rangka pembangunan nasional. Sebagai pedoman planning tersebut diambil pengalaman-pengalaman yang terdapat di negara-negara maju. Hal ini perlu diperhatikan agar kita dapat menghindari kekeliruan-kekeliruan yang pernah dialami oleh negara-negara maju.

### Pengertian dan Interesse atas ekonomi pendidikan

Pengertian ekonomi pendidikan barulah muncul pada permulaan tahun lima puluhan. Dasar pemikiran adalah pendidikan dan penyelidikan (riset) merupakan salah satu unsur ekonomi secara keseluruhan, mengingat pendidikan dan penyelidikan dapat dipandang sebagai alat produksi dengan tujuan untuk meningkatkan taraf penghidupan. (Hal ini hanyalah merupakan salah satu aspek pendidikan. Karena lepas dari tujuan ekonomi, terdapat juga unsur 'manusia' itu sendiri. Hal ini di sini tidak disinggung). Sampai saat ini pengertian bahwa pendidikan merupakan salah satu unsur ekonomi secara menyeluruh, belumlah diterima secara umum. Bombach pernah menulis bahwa ekonomi pendidikan mengalami perkembangan dan nasib sejajar dengan ilmu keuangan.

Usaha pertama untuk menganalisa aspek ekonomi pendidikan secara sistematis dilakukan di Amerika Serikat<sup>1</sup>. Hanya baru-baru ini baik oleh institusi-institusi internasional, seperti UNESCO dan OECD, maupun oleh negara-negara maju, persoalan ekonomi pendidikan mendapatkan perhatian besar. Hal ini disebabkan oleh:

1. Besarannya pembiayaan pendidikan (di Jerman Barat pembiayaan pendidikan mencapai  $\pm 3,4\%$  atau lebih daripada produksi sosialnya). Dari penyelidikan-penyelidikan atas pendidikan ternyata bahwa pengeluaran/pembiayaan pendidikan bertambah besar lebih daripada pertumbuhan/perkembangan baik penduduk maupun produksi sosial<sup>2</sup>.

Maka dirasa perlu adanya penyelidikan 'ekonomi pendidikan' secara sistematis untuk menentukan kriteria-kriteria yang rasional mengenai besar serta struktur pengeluarannya/ pembiayaannya demi penentuan alokasi pengeluaran pemerintah untuk pendidikan. Perkembangan ini menyebabkan di satu pihak adanya pergeseran titik-berat dari kuantitas ke kualitas mutu pendidikan dan di lain pihak bahwa pendidikan merupakan salah satu pengeluaran di mana penentuan pembiayaan tidak terlepas dari pembiayaan kebutuhan-kebutuhan sektor ekonomi lainnya<sup>3</sup>. Maka perlu dicari jalan untuk menentukan alokasi secara optimal untuk pendidikan.

2. Mengingat kekuatan-kekuatan pasaran (market forces) dalam sektor pendidikan tidak secara langsung dapat mempengaruhi, maka dengan sistem alokasi, sektor pendidikan dapat dipengaruhi. Untuk menentukan alokasi tersebut dibutuhkan adanya suatu planning dari pihak pemerintah. Planning yang dibuat oleh pemerintah mempunyai tujuan untuk menentukan politik pendidikan dan memilih/menentukan prioritas dalam strategi pendidikannya. Di sini perlu diperhatikan perubahan-perubahan struktural yang akan datang baik dari sudut permintaan (demand) di sektor ekonomi nasional,

<sup>1</sup>T.W. Schultz, Investment in Man, An Economist's View Social Science Review, 23 (1959), 109.

T.W. Schultz, Capital Formation by Education Journal of Political Economy LXVIII (1960), hal. 571.

<sup>2</sup>F. Eddin, Internationale Tendenzen in der Entwicklung der Ausgaben für Schulen und Hochschulen, Kieler Studien, Bd. 47, (Kiel: 1958)

J. Vaizey, The costs of education. (London: 1958)

<sup>3</sup>F. Harbison dan Ch. A. Myers, Education, Manpower and Economic Growth, Strategies of Human Resource Development, (New York).

industriil dan di sektor pemerintahan maupun dari sudut penawaran (supply) dari sistim pendidikan atas tenaga ahli (qualified and high qualified workers), supaya secara sistematis diperhitungkan. Perlu diingat bahwa proses pendidikan memakan waktu yang lama (long operation period).

3. Tuntutan bahwa pertumbuhan/perkembangan ekonomi (economic growth) tidak boleh terganggu dan harus berjalan lancar mendorong untuk mempelajari persoalan-persoalan ekonomi pendidikan. Pengalaman yang dialami oleh negara-negara maju pada tahun limapuluhan adalah bahwasanya sebelumnya terdapat kelebihan penawaran tenaga ahli dan seterusnya (dari tahun limapuluhan sampai sekarang) permintaan atas tenaga ahli melebihi penawarannya. (Di Indonesia, seperti di negara-negara yang sedang berkembang, secara latent terdapat kelebihan penawaran tenaga ahli). Di lain pihak karena inelastisitas penawaran sektor pendidikan, maka perhatian bertambah besar untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan penduduk-pekerja dan tingkat pertumbuhan/perkembangan ekonomi. Kenaikan produksi faktor-faktor produktif yang tersedia hanyalah tercapai dengan kenaikan tingkat serta mutu pendidikan. Maka pemerintah harus mengadakan perluasan dalam bidang pendidikan secara menyeluruh dan teratur, karena sistim pendidikan menentukan pentrapan faktor 'kemajuan tehnik' (technische Fortschritt) melalui perluasan/pengintensipan penyelidikan dan melalui pemberian pengetahuan serta kecakapan/ketrampilan pada penduduk-pekerjanya.

Terlihat di atas bahwa interese untuk menyelidiki relevans ekonomis pendidikan didasarkan atas tuntutan praktis-politis. Sebagai dasar analisa adalah penerusan dari teori neo-klassik pertumbuhan/perkembangan ekonomi (economic growth)<sup>1</sup>.

Dalam penyelidikan-penyelidikan 'ekonomi pendidikan' dipergunakan beberapa model/metode analisa, yaitu model penawaran (individual demand approach), model permintaan (manpower approach), kombinasi kedua model tersebut dan model 'cost benefit'. Model-model tersebut mempunyai persamaan, yaitu kemampuannya mencoba menentukan hubungan antara pendidikan dan pendapatan.

<sup>1</sup> Heinz König, Wachstum und Entwicklung der Wirtschaft, (Köln: Kiepenhauer & Witsch, 1968)

Di bawah ini ingin diuraikan secara singkat metode-metode tersebut. Metode 'cost benefit' tidak akan disinggung mengingat metode tersebut mempunyai kelemahan yang inherent, yaitu:

1. dasar mikro-ekonomis dan
2. adanya konkurensi yang sempurna

Ini tidak berarti bahwa metode ini salah, melainkan pada saat ini kurang relevant untuk pembangunan di Indonesia.

### Model Penawaran (individual approach)

Tujuan model penawaran adalah memberikan secara cukup atas kemungkinan-kemungkinan/kesempatan-kesempatan pendidikan pada mereka yang memintanya. Dasar dari model tersebut adalah pandangan yang liberal, yaitu pemerintah harus memenuhi keinginan yang layak dari tiap warga negaranya. Seperti Dahrendorf mendasarkan tesisnya pada ide: 'Bildung ist Bürgerrecht'<sup>1</sup>. Didorong oleh keinginan untuk memberikan kesempatan yang sama untuk belajar serta memilih jenis pekerjaan mengharuskan pihak pemerintah untuk mengadakan alokasi yang optimal, baik manusia maupun alat. Ini hanya dapat dilaksanakan jika ada keseimbangan dalam besar serta struktur dari penawaran dan permintaan.

H.P. Widmaier mengajukan model penawaran dalam penelitiannya untuk negara bagian Baden-Württemberg<sup>2</sup>. Dasar dari model ini adalah mengadakan suatu prognose penduduk, tidak hanya dilihat dari sudut perkerbangannya, akan tetapi juga mobilitas yang horizontal.

Kelemahan model penawaran adalah penaknaan koefisien-koefisien yang fix, di mana penganggapan bahwa keadaan yang lampau akan berjalan terus. Model ini mengambill sistim yang ada sebagai ukuran untuk waktu yang akan datang. Ini dapat diterima, jika sistim yang ada memuaskan. Kelemahan lain dari model penawaran adalah permintaan akan tenaga ahli sama sekali tidak diperhatikan, yang memberikan pengaruh selanjutnya pada taraf harga.

<sup>1</sup>R. Dahrendorf, Bildung ist Bürgerrecht (Osnabrück: 1965)

<sup>2</sup>H.P. Widmaier, Bildung und Wirtschaftswachstum, Schriftenreihe des Kultusministerium Baden-Württemberg (1968).

### Model Permintaan (manpower approach)

Model penawaran memperlihatkan adanya bahaya akan kelebihan atau kekurangan produksi tenaga ahli. Individualisme terbentur pada batas-batas ekonomi. Model permintaan bertitik-tolak dari kebutuhan akan tenaga ahli. Dasar pemikiran model permintaan adalah bahwasanya tujuan pendidikan dapat disimpulkan dari perkembangan ekonomi.

Jadi pendidikan adalah tergantung atas perkembangan/pertumbuhan pendapatan nasional. Model ini ingin menentukan suatu sistem pendidikan yang didasarkan atas kebutuhan dan alokasi optimal yang efisien dan ekonomis. Kelemahan model permintaan adalah apakah dapat dijamin bahwasanya permintaan akan tempat pendidikan tidak akan melampaui batas kemampuan.

### Kombinasi Model Penawaran dan Permintaan

Mengingat adanya hubungan timbal-balik dari kedua model tersebut di atas, maka dirasa perlu adanya suatu model kombinasi, yang mengambil faktor-faktor dari kedua model di atas. Dalam model Widmaier<sup>1</sup> dan Bahr<sup>2</sup> telah dicoba untuk mengupas persoalan ini. V. Weizsäcker menganalisa faktor-faktor kausal untuk sukses dari sudut psikologis dan sosiologis dengan pemakaian computer untuk mencakup perubahan-perubahan dan menentukan "apa" dan "apa yang mungkin"<sup>3</sup>. A. Hegelheimer memberikan suatu skema model kombinasi antara penawaran dan permintaan yang kami lampirkan di bawah<sup>4</sup>.

### Kesimpulan

Mengingat pentingnya pendidikan untuk perkembangan/pertumbuhan ekonomi, perlu kiranya diperhatikan faktor-faktor ekonomi. Mengingat perkembangan pengetahuan "ekonomi pendidikan" masih berjalan dan dengan belum adanya model

---

<sup>1</sup> ibid.

<sup>2</sup> K. Bahr dan H.P. Widmaier, Bildungsplanung, Ansätze einer rationalen Bildungspolitik (Stuttgart: 1966)

<sup>3</sup> C.C.V. Weizsäcker, Ein quantitatives Modell des Bildungswesen, Institut für Bildungsforschung (Berlin: 1967)

<sup>4</sup> A. Hegelheimer, Bildungsökonomie und Bildungsplanung, Konjunkturpolitik 7 (1968), hal. 93.

yang memuaskan untuk menentukan planning pendidikan, salah satu model yang kiranya dapat diambil adalah model kombinasi penawaran/perrintaan. Model tersebut berdasarkan atas "balance of education" yang sempurna, yang merupakan kelemahan model tersebut.

Untuk merealisasikan penyusunan planning pendidikan perlu kiranya diadakan suatu institusi untuk mengadakan penyelidikan-penyelidikan persoalan pendidikan secara sistematis dan menyeluruh.